



STRATEGI PENGEMBANGAN SENTRA PERIKANAN BUDIDAYA BERBASIS POTENSI WILAYAH UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING SEKTOR PERIKANAN KOTA SUNGAI PENUH

Rio Melindo

Perencana Ahli Muda Pemerintah Kota Sungai Penuh

Email Korespondensi: melindo163@gmail.com

Abstract

The development of aquaculture is a strategic approach to strengthening food security, improving community welfare, and promoting sustainable regional economic growth. Sungai Penuh City possesses considerable freshwater aquaculture potential; however, its utilization has not yet reached an optimal level. This condition is reflected in fluctuating aquaculture production, declining outputs of Community Fish Hatchery Units (UPR) and fish processing industries, and significant disparities in production across districts. This study aims to analyze the key challenges in developing area-based aquaculture centers and to formulate the most feasible policy alternative for enhancing the productivity and competitiveness of the fisheries sector in Sungai Penuh City. A qualitative descriptive approach was employed using William N. Dunn's policy analysis framework, encompassing problem structuring, forecasting, policy recommendation, and evaluation of policy alternatives. Data were collected through document analysis, field observation, and in-depth interviews with key stakeholders, including local government officials, fisheries extension officers, academics, and aquaculture practitioners. The findings indicate that the primary challenge lies not only in low production performance but also in the weak integration of the fisheries value chain, limited inter-agency coordination, and the absence of aquaculture center development based on regional comparative advantages. Comparative analysis using Dunn's policy evaluation criteria—effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness—identified the policy alternative of developing area-based aquaculture centers through the integration of hatchery, fish farming, processing, marketing, and institutional strengthening as the most feasible option. The implementation of this policy is expected to increase aquaculture productivity, enhance regional competitiveness, expand employment opportunities, improve fish farmers' income, and support sustainable regional development in Sungai Penuh City.

Keywords: aquaculture, regional potential, public policy, productivity, sustainability

Abstrak

Pengembangan sektor perikanan budidaya merupakan salah satu strategi penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kota Sungai Penuh memiliki potensi sumber daya perikanan air tawar yang cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal. Kondisi tersebut tercermin dari fluktuasi produksi budidaya, penurunan produksi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan hasil pengolahan perikanan, serta ketimpangan produksi antarwilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan pengembangan sentra perikanan budidaya berbasis potensi wilayah serta merumuskan alternatif kebijakan yang paling layak untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor perikanan di Kota Sungai Penuh. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis kebijakan berdasarkan tahapan William N. Dunn yang meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi kebijakan, serta evaluasi alternatif kebijakan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan yang terdiri atas pemerintah daerah, penyuluh perikanan, akademisi, dan pelaku usaha perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya rendahnya produktivitas, tetapi juga belum terintegrasinya rantai nilai perikanan, terbatasnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum adanya pengembangan sentra budidaya berbasis keunggulan wilayah.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
journalsjp@gmail.com/admin@lkispol.or.id



Berdasarkan analisis komparatif menggunakan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan, alternatif kebijakan berupa pengembangan sentra perikanan budidaya berbasis potensi wilayah melalui integrasi pembenihan, budidaya, pengolahan, pemasaran, dan penguatan kelembagaan memperoleh nilai tertinggi dibandingkan alternatif lainnya. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing sektor perikanan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pembudidaya, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: akuakultur, potensi daerah, kebijakan publik, produktivitas, keberlanjutan.

Pendahuluan

Pembangunan sektor perikanan merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor ini memiliki peran strategis karena mampu menyediakan sumber protein hewani yang berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan menjadi salah satu penggerak pembangunan wilayah. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor akuakultur (*aquaculture*) menjadi subsektor pangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan diproyeksikan menjadi sumber utama penyediaan ikan konsumsi global. Melalui agenda Blue Transformation, Food and Agriculture Organization (FAO) mendorong transformasi pembangunan perikanan budidaya yang produktif, efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan dunia (FAO, 2024).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor perikanan tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi, tetapi juga diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi penggunaan sumber daya, penguatan rantai nilai (*value chain*), adaptasi terhadap perubahan iklim, dan peningkatan daya saing. Garlock et al. (2024) menjelaskan bahwa keberlanjutan akuakultur sangat ditentukan oleh keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Senada dengan itu, Xu et al. (2024) menyatakan bahwa peningkatan produksi budidaya harus diiringi dengan pengelolaan wilayah yang berkelanjutan agar manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dicapai secara bersamaan.

Di Indonesia, pembangunan sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan. Berbagai regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pembangunan budidaya perikanan harus dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, memperhatikan daya dukung lingkungan, serta mengoptimalkan potensi wilayah sebagai dasar pengembangan kawasan budidaya.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional tersebut, pembangunan daerah saat ini semakin menekankan pendekatan *place-based development*, yaitu pembangunan yang disusun berdasarkan karakteristik, potensi, dan kebutuhan spesifik setiap wilayah. Pendekatan ini menempatkan sumber daya lokal sebagai kekuatan utama dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga kebijakan pembangunan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran (OECD, 2025). Dalam konteks sektor perikanan, pendekatan tersebut memungkinkan setiap wilayah mengembangkan komoditas dan sistem budidaya sesuai dengan keunggulan sumber daya yang dimiliki.

Kota Sungai Penuh merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki potensi cukup besar dalam pengembangan perikanan budidaya air tawar. Potensi tersebut didukung oleh ketersediaan sumber daya air, lahan budidaya, serta keberadaan kelompok pembudidaya ikan yang tersebar di beberapa kecamatan. Selain itu, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi ikan memberikan peluang bagi sektor perikanan untuk menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi tersebut juga tercermin dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2025–2029, yang menempatkan pembangunan sektor perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.



Meskipun memiliki potensi yang besar, perkembangan sektor perikanan budidaya di Kota Sungai Penuh belum menunjukkan kinerja yang optimal. Perkembangan produksi budidaya, produksi hasil pengolahan, dan produksi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) selama periode 2022–2025 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Perkembangan Kinerja Sektor Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2022–2025

Tahun	Produksi Budidaya (kg)	Produksi Pengolahan (kg)	Produksi UPR (ekor)
2022	239.052	107.611	1.397.800
2023	259.307	120.426	985.000
2024	235.654	106.004	593.750
2025	164.215	87.090	510.000

Sumber: DPKPP Kota Sungai Penuh (2026).

Berdasarkan Tabel 1, produksi budidaya mengalami peningkatan pada tahun 2023, namun kembali menurun pada tahun 2024 dan turun cukup tajam pada tahun 2025. Penurunan juga terjadi pada produksi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta hasil pengolahan perikanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sektor perikanan budidaya belum berlangsung secara konsisten sehingga mengindikasikan adanya permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan kegiatan budidaya, tetapi juga pada sistem pendukungnya.

Selain mengalami fluktuasi produksi, perkembangan sektor perikanan budidaya juga menunjukkan ketimpangan antarwilayah. Data produksi budidaya menurut kecamatan pada tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2: Produksi Budidaya Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Produksi (kg)	Persentase (%)
Tanah Kampung	78.012	33,1
Hamparan Rawang	58.695	24,91
Sungai Bungkal	38.301	16,25
Pondok Tinggi	28.090	11,92
Pesisir Bukit	21.639	9,18
Kumun Debai	6.081	2,58
Koto Baru	3.616	1,53
Sungai Penuh	1.219	0,52
Total	235.654	100

Sumber: DPKPP Kota Sungai Penuh (2026).

Tabel 2 menunjukkan bahwa produksi budidaya masih terkonsentrasi pada beberapa kecamatan, terutama Tanah Kampung, Hamparan Rawang, dan Sungai Bungkal. Sebaliknya, Kecamatan Sungai Penuh dan Koto Baru memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total produksi daerah. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya variasi pemanfaatan potensi budidaya antarwilayah di Kota Sungai Penuh.

Di sisi lain, berbagai program pembangunan sektor perikanan yang telah dilaksanakan selama ini masih didominasi oleh penyediaan bantuan sarana produksi, seperti benih, pakan, dan peralatan budidaya. Meskipun memberikan manfaat bagi kelompok pembudidaya, perkembangan indikator produksi menunjukkan bahwa hasil yang dicapai belum sepenuhnya stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan produktivitas sektor perikanan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sarana produksi, tetapi juga memerlukan pengelolaan kawasan budidaya, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses pasar, serta integrasi rantai nilai perikanan (Garlock et al., 2024; Xu et al., 2024).



Tabel 3: Ringkasan Kondisi Eksisting Sektor Perikanan Budidaya Kota Sungai Penuh

Aspek	Kondisi
Produksi budidaya	Berfluktuasi dan menurun pada periode 2024–2025
Produksi UPR	Menurun setiap tahun
Produksi hasil pengolahan	Cenderung menurun
Produksi antarwilayah	Belum merata antar kecamatan
Program pembangunan	Masih didominasi bantuan sarana produksi

Sumber: Diolah dari DPKPP Kota Sungai Penuh (2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Kota Sungai Penuh dengan capaian kinerja sektor perikanan budidaya yang masih berfluktuasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sektor perikanan budidaya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji lebih lanjut. Kajian tersebut menjadi penting sebagai dasar dalam mengidentifikasi akar permasalahan pembangunan sektor perikanan budidaya sehingga dapat menjadi landasan pada pembahasan identifikasi masalah dan analisis kebijakan pada bab-bab berikutnya.

Metode

Analisis kebijakan dalam policy paper ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengidentifikasi alternatif kebijakan yang paling efektif dalam mendukung pengembangan sentra perikanan budidaya berbasis potensi wilayah di Kota Sungai Penuh. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan hasil identifikasi permasalahan, kajian teoritis, serta hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan ke dalam suatu proses pengambilan keputusan kebijakan yang sistematis dan rasional.

Proses analisis kebijakan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah identifikasi dan penentuan prioritas masalah menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG). Metode USG digunakan untuk menentukan permasalahan yang paling strategis berdasarkan tiga dimensi penilaian, yaitu tingkat urgensi (*urgency*), tingkat keseriusan dampak (*seriousness*), dan potensi perkembangan masalah apabila tidak segera ditangani (*growth*).

Tahap kedua dilakukan melalui analisis akar permasalahan (*problem analysis*) dengan pendekatan Problem Tree Analysis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara permasalahan utama, penyebab langsung (*level 1*), penyebab mendasar (*level 2*), serta dampak yang ditimbulkan terhadap pembangunan sektor perikanan di Kota Sungai Penuh.

Pembahasan

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara permasalahan, faktor penyebab, proses implementasi kebijakan, serta alternatif solusi yang dirumuskan dalam suatu policy paper. Kerangka teori membantu peneliti memahami fenomena secara sistematis, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi suatu permasalahan, serta menjadi dasar dalam menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan (Creswell & Creswell, 2023).

Dalam *policy paper* ini, kerangka teori digunakan untuk menganalisis pengembangan sentra perikanan budidaya berbasis potensi wilayah di Kota Sungai Penuh melalui empat perspektif utama, yaitu teori pembangunan berbasis potensi wilayah (*place-based development*), teori pengembangan klaster (*cluster development*), teori implementasi kebijakan, dan teori collaborative governance. Keempat teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan proses pembangunan kawasan perikanan budidaya yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Teori Pembangunan Berbasis Potensi Wilayah (*Place-Based Development*)

Pendekatan *place-based development* merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan karakteristik wilayah sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Pendekatan ini berangkat



dari pemahaman bahwa setiap daerah memiliki sumber daya alam, kondisi geografis, kapasitas kelembagaan, karakteristik sosial ekonomi, dan peluang pengembangan yang berbeda sehingga memerlukan kebijakan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.

OECD (2025) menjelaskan bahwa *place-based policies* merupakan pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui optimalisasi potensi lokal. Pendekatan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan daerah, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan agar pembangunan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan OECD (2025), implementasi *place-based development* memiliki beberapa prinsip utama, yaitu: optimalisasi potensi lokal; penguatan kapasitas kelembagaan daerah; integrasi pembangunan lintas sektor; kolaborasi antar pemangku kepentingan; dan peningkatan daya saing wilayah.

Teori Klaster Industri (*Cluster Development Theory*)

Pengembangan klaster merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan produktivitas melalui penguatan keterkaitan antar pelaku usaha dalam suatu kawasan. OECD (2023) menjelaskan bahwa pengembangan klaster mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan jaringan usaha, inovasi, transfer teknologi, serta peningkatan daya saing.

Pada sektor perikanan, klaster tidak hanya mencakup kegiatan budidaya, tetapi melibatkan seluruh rantai nilai (*value chain*), mulai dari penyediaan benih, produksi, pengolahan hasil, distribusi, hingga pemasaran. Keterhubungan antar pelaku tersebut akan meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat inovasi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Dalam pengembangan sentra perikanan budidaya, konsep klaster mencakup : Unit Pembenihan Rakyat (UPR); Pembudidaya ikan; kelompok pembudidaya (Pokdakan); industri pengolahan ikan; pedagang dan distributor; lembaga pembiayaan; penyuluh perikanan; pemerintah daerah; perguruan tinggi.

Teori Implementasi Kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaannya, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu: komunikasi; sumber daya; disposisi pelaksana; struktur birokrasi.

Teori ini digunakan untuk menganalisis mengapa pengembangan sentra perikanan budidaya di Kota Sungai Penuh belum berjalan optimal meskipun berbagai program pemerintah telah dilaksanakan.

Teori Collaborative Governance

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan pemerintah bersama para pemangku kepentingan non-pemerintah secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Dalam pengembangan sentra perikanan budidaya, kolaborasi diperlukan karena keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Pembudidaya, kelompok usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program.

Alternatif/Pilihan Kebijakan

Metodologi Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dalam policy paper ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengidentifikasi alternatif kebijakan yang paling efektif dalam mendukung pengembangan sentra perikanan budidaya berbasis potensi wilayah di Kota Sungai Penuh.

Proses analisis kebijakan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah identifikasi dan penentuan prioritas masalah menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG). Metode USG digunakan untuk menentukan permasalahan yang paling strategis



berdasarkan tiga dimensi penilaian, yaitu tingkat urgensi (*urgency*), tingkat keseriusan dampak (*seriousness*), dan potensi perkembangan masalah apabila tidak segera ditangani (*growth*). Hasil analisis USG menunjukkan bahwa belum optimalnya pengembangan sentra perikanan budidaya berbasis potensi wilayah merupakan permasalahan yang memiliki tingkat prioritas tertinggi sehingga menjadi fokus utama dalam penyusunan policy paper ini.

Tahap kedua dilakukan melalui analisis akar permasalahan (*problem analysis*) dengan pendekatan Problem Tree Analysis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara permasalahan utama, penyebab langsung (*level 1*), penyebab mendasar (*level 2*), serta dampak yang ditimbulkan terhadap pembangunan sektor perikanan di Kota Sungai Penuh. Melalui pendekatan ini diperoleh gambaran bahwa rendahnya produktivitas budidaya, belum terintegrasinya rantai nilai sektor perikanan, keterbatasan infrastruktur kawasan budidaya, serta lemahnya koordinasi lintas sektor merupakan faktor-faktor utama yang menyebabkan belum berkembangnya sentra perikanan budidaya secara optimal.

Selanjutnya, penyusunan alternatif kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis permasalahan, kondisi eksisting daerah, arah kebijakan pembangunan nasional, serta berbagai teori yang telah dibahas pada Bab II, yaitu *Place-Based Development*, *Cluster Development Theory*, *Implementation Theory*, dan *Collaborative Governance*. Berdasarkan hasil analisis tersebut disusun beberapa alternatif kebijakan yang dinilai realistis untuk diterapkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor perikanan.

Setiap alternatif kebijakan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi masing-masing alternatif kebijakan. Dengan demikian, setiap alternatif tidak hanya dinilai berdasarkan manfaat yang diharapkan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan kebijakan.

Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi kelayakan alternatif kebijakan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2018). Evaluasi dilakukan berdasarkan enam kriteria, yaitu efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*).

Untuk meningkatkan objektivitas hasil analisis, penilaian terhadap alternatif kebijakan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan empat orang responden yang sama pada tahap analisis USG, yaitu:

1. Perencana Ahli Madya Bapperida Kota Sungai Penuh;
2. Perencana Ahli Muda Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh;
3. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh;
4. Penyuluh Perikanan Kota Sungai Penuh.

Setiap responden diminta memberikan penilaian terhadap masing-masing alternatif kebijakan menggunakan skala 1–10 pada setiap kriteria evaluasi Dunn. Selanjutnya dilakukan diskusi untuk memperoleh penjelasan mengenai alasan pemberian nilai, sehingga hasil evaluasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga didukung oleh pertimbangan kualitatif yang menggambarkan kondisi nyata sektor perikanan di Kota Sungai Penuh. Hasil penilaian dari seluruh responden kemudian direkapitulasi untuk menentukan alternatif kebijakan yang memperoleh nilai tertinggi. Alternatif tersebut selanjutnya dipilih sebagai rekomendasi utama dalam policy paper ini.

Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, analisis akar permasalahan, serta kajian teoritis pada Bab II, diperlukan alternatif kebijakan yang mampu menjawab permasalahan pembangunan sektor perikanan budidaya secara lebih terarah, komprehensif, dan berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi Kota Sungai Penuh bukan hanya berkaitan dengan rendahnya produksi budidaya ikan, tetapi juga belum



optimalnya pengembangan sentra perikanan yang mampu mengintegrasikan aspek produksi, pembenihan, pengolahan hasil, pemasaran, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha.

Dalam konteks tersebut, penyusunan alternatif kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil sektor perikanan Kota Sungai Penuh, potensi wilayah, kapasitas fiskal daerah, arah kebijakan pembangunan nasional, serta hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan. Alternatif kebijakan yang dirumuskan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha budidaya, memperkuat daya saing produk perikanan, serta menciptakan sistem usaha perikanan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dirumuskan tiga alternatif kebijakan yang selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan *Strengths, Weaknesses, Opportunities*, dan *Threats* (SWOT). Ketiga alternatif tersebut memiliki fokus intervensi yang berbeda, namun seluruhnya diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan budidaya sebagai salah satu potensi unggulan daerah.

Analisis Perbandingan Alternatif Kebijakan

Untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling tepat dalam mendukung pengembangan sentra perikanan budidaya di Kota Sungai Penuh, ketiga alternatif kebijakan yang telah dirumuskan perlu dibandingkan secara sistematis. Analisis perbandingan dilakukan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2018), yaitu efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*).

Penggunaan keenam kriteria tersebut bertujuan agar proses pemilihan kebijakan dilakukan secara objektif berdasarkan kemampuan masing-masing alternatif dalam menyelesaikan permasalahan, efisiensi penggunaan sumber daya, pemerataan manfaat, kesesuaian terhadap kebutuhan masyarakat, serta kelayakan implementasinya. Dengan demikian, alternatif kebijakan yang dipilih tidak hanya memberikan dampak yang besar, tetapi juga realistis untuk diterapkan sesuai dengan kondisi pembangunan sektor perikanan di Kota Sungai Penuh. Kriteria evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4: Aspek Analisis Kelayakan Kebijakan

Kriteria	Esensi Penilaian
Efektivitas	Kemampuan alternatif kebijakan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor perikanan budidaya.
Efisiensi	Kemampuan alternatif menghasilkan manfaat yang optimal dengan penggunaan sumber daya dan biaya yang proporsional.
Kecukupan (Adequacy)	Tingkat kemampuan alternatif dalam menyelesaikan akar permasalahan sektor perikanan budidaya.
Pemerataan (Equity)	Kemampuan alternatif memberikan manfaat secara adil kepada pembudidaya, kelompok usaha, dan masyarakat di berbagai wilayah.
Responsivitas (Responsiveness)	Kemampuan alternatif menjawab kebutuhan pembudidaya, kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), serta pelaku usaha perikanan.
Ketepatan (Appropriateness)	Tingkat kesesuaian alternatif dengan kondisi daerah, arah pembangunan, dan kemampuan implementasi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026.

Untuk meningkatkan objektivitas penilaian, empat narasumber yang sebelumnya terlibat dalam analisis Urgency, Seriousness, and Growth (USG) kembali dilibatkan melalui wawancara semi-terstruktur. Narasumber terdiri atas Perencana Ahli Madya Bapperida Kota Sungai Penuh, Perencana Ahli Muda Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Bidang Perikanan, serta Penyuluh Perikanan. Masing-masing responden diminta memberikan penilaian menggunakan skala 1–10 terhadap setiap



alternatif kebijakan berdasarkan enam kriteria evaluasi Dunn. Hasil penilaian masing-masing responden kemudian direkapitulasi sebagaimana disajikan pada Tabel 8

Tabel 5: Rekapitulasi Analisis Kelayakan Alternatif Kebijakan

Kriteria	Responden	Alternatif I	Alternatif II	Alternatif III
Efektivitas	R1	7	9	7
	R2	7	9	7
	R3	8	9	7
	R4	7	8	8
	Sub Total	29	35	29
Efisiensi	R1	8	8	6
	R2	7	8	6
	R3	7	8	6
	R4	7	8	6
	Sub Total	29	32	24
Kecukupan	R1	7	9	7
	R2	7	9	7
	R3	8	9	7
	R4	7	9	7
	Sub Total	29	36	28
Pemerataan	R1	7	9	8
	R2	7	8	8
	R3	7	9	8
	R4	8	9	7
	Sub Total	29	35	31
Responsivitas	R1	8	9	7
	R2	7	9	7
	R3	7	9	7
	R4	8	9	8
	Sub Total	30	36	29
Ketepatan	R1	8	9	7
	R2	7	8	7
	R3	7	9	7
	R4	8	9	8
	Sub Total	30	35	29

Tabel 6: Rekapitulasi Total Nilai Alternatif Kebijakan

Responden	Alternatif I	Alternatif II	Alternatif III
R1	45	53	42
R2	42	51	42
R3	44	53	42
R4	45	52	44
TOTAL NILAI	176	209	170
Peringkat	II	I	III



Berdasarkan hasil penilaian pada Tabel 5 dan Tabel 6 yaitu Pengembangan Sentra Perikanan Budidaya Berbasis Potensi Wilayah, memperoleh nilai tertinggi dibandingkan alternatif lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa alternatif ini dinilai paling mampu memenuhi enam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018), khususnya pada aspek efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan implementasi.

Keunggulan utama alternatif ini terletak pada kemampuannya menjawab akar permasalahan pembangunan sektor perikanan secara menyeluruh. Berbeda dengan Alternatif I yang lebih menitikberatkan pada peningkatan produktivitas melalui bantuan sarana produksi dan peningkatan kapasitas pembudidaya, serta Alternatif III yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan tata kelola, Alternatif II mengintegrasikan seluruh komponen pembangunan sektor perikanan dalam satu sistem berbasis potensi wilayah. Pendekatan ini memungkinkan keterhubungan yang lebih kuat antara kegiatan pembenihan, budidaya, pengolahan hasil, pemasaran, penguatan kelembagaan, hingga dukungan pembiayaan dan kemitraan.

Selain meningkatkan produktivitas budidaya, pengembangan sentra perikanan berbasis potensi wilayah juga mampu menciptakan nilai tambah melalui penguatan rantai nilai (*value chain*) sektor perikanan. Integrasi antar pelaku usaha tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, memperkuat posisi tawar pembudidaya, serta menciptakan peluang usaha baru yang memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

Dari aspek pemerataan, alternatif ini dinilai mampu memberikan manfaat yang lebih merata karena pengembangan sentra dilakukan berdasarkan potensi masing-masing wilayah. Kecamatan yang memiliki produksi budidaya tinggi dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan, sementara wilayah lain didorong menjadi kawasan pendukung sesuai dengan keunggulan yang dimiliki. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep Place-Based Development, yang menempatkan karakteristik lokal sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap ketiga alternatif kebijakan, Pengembangan Sentra Perikanan Budidaya Berbasis Potensi Wilayah ditetapkan sebagai alternatif kebijakan yang paling direkomendasikan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor perikanan Kota Sungai Penuh. Pemilihan alternatif ini didasarkan pada hasil evaluasi menggunakan kriteria Dunn yang menunjukkan bahwa alternatif tersebut memperoleh nilai tertinggi pada aspek efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan implementasi.

Alternatif kebijakan ini dipandang paling mampu menjawab akar permasalahan pembangunan sektor perikanan karena tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi budidaya, tetapi juga membangun sistem usaha perikanan yang terintegrasi mulai dari penyediaan benih, kegiatan budidaya, pengolahan hasil, pemasaran, penguatan kelembagaan, hingga dukungan infrastruktur dan pembiayaan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi rantai pasok, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan secara berkelanjutan.

Implementasi kebijakan diarahkan pada empat strategi utama. Pertama, menetapkan dan mengembangkan kawasan sentra perikanan budidaya berdasarkan potensi produksi pada masing-masing kecamatan. Kedua, memperkuat rantai nilai sektor perikanan melalui integrasi kegiatan pembenihan, budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. Ketiga, meningkatkan kapasitas pembudidaya, kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan. Keempat, mengembangkan sistem pemasaran berbasis digital dan memperluas kemitraan dengan sektor swasta, lembaga keuangan, serta perguruan tinggi.

Dengan demikian, rekomendasi kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga pada pembentukan ekosistem usaha perikanan yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.



Tabel 7: Tahapan Implementasi Pengembangan Sentra Perikanan Budidaya Berbasis Potensi Wilayah

Tahapan	Fokus	Langkah-langkah
Jangka Pendek (1–2 Tahun)	Penguatan kelembagaan dan penetapan kawasan sentra	• Pemetaan potensi budidaya per kecamatan.
		• Penetapan kawasan sentra budidaya ikan.
		• Penguatan Pokdakan dan UPR.
		• Penyediaan benih unggul dan bantuan sarana produksi.
		• Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
Jangka Menengah (3–5 Tahun)	Pengembangan rantai nilai dan infrastruktur	• Pembangunan fasilitas pascapanen dan rumah produksi.
		• Pengembangan koperasi perikanan.
		• Digitalisasi pemasaran hasil budidaya.
		• Pengembangan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan.
		• Integrasi program lintas OPD melalui Peraturan Wali Kota.
Jangka Panjang (5–10 Tahun)	Penguatan daya saing dan keberlanjutan	• Pengembangan kawasan perikanan terpadu.
		• Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.
		• Integrasi dengan pasar regional.
		• Penerapan sistem budidaya berbasis teknologi.
		• Pengembangan pusat inovasi perikanan daerah.

Sumber: Diolah Penulis (2026).

Tabel 8: Dukungan Kelembagaan, Regulasi, dan Pembiayaan

Komponen	Dukungan yang Diperlukan	Penanggung Jawab
Kelembagaan	Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Sentra Perikanan Budidaya	Bapperida, DPKPP
Regulasi	Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Sentra Perikanan Budidaya	Bagian Hukum Setda, Bapperida
Pembiayaan	Integrasi APBD, DAK, Dana Alokasi Khusus Tematik, CSR, dan KUR	BKAD, DPRD, Perbankan
Kemitraan	Kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga keuangan	DPKPP, Perguruan Tinggi, OJK
Monitoring dan Evaluasi	Penguatan sistem monitoring berbasis indikator kinerja	Bapperida, DPKPP, Diskominfo

Sumber: Diolah Penulis (2026).

Dukungan kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pembentukan tim koordinasi akan memperkuat sinergi lintas sektor, sementara regulasi memberikan kepastian arah kebijakan. Integrasi pembiayaan dari berbagai sumber diharapkan mampu menjamin keberlanjutan program, sedangkan sistem monitoring berbasis indikator kinerja mendukung evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala.

Tabel 9: Matriks Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan

Aktor	Peran Utama	Fungsi
Wali Kota	Pengarah kebijakan	Menetapkan kebijakan strategis dan regulasi
Bapperida	Koordinator	Sinkronisasi program dan monitoring



Aktor	Peran Utama	Fungsi
DPKPP	Pelaksana utama	Pengembangan budidaya, pembinaan Pokdakan, UPR
Diskominfo	Digitalisasi	Pengembangan sistem informasi dan pemasaran digital
Dinas PUPR	Infrastruktur	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung
BKAD	Pembiayaan	Penyediaan anggaran dan integrasi sumber pembiayaan
Perguruan Tinggi	Pendampingan	Inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas SDM
Perbankan/OJK	Pembiayaan usaha	Fasilitasi akses KUR dan pembiayaan

Tabel 10: Dampak Implementasi Kebijakan

Horizon Waktu	Dampak Ekonomi	Dampak Sosial
Jangka Pendek (1–2 Tahun)	Produksi budidaya meningkat dan biaya produksi menurun	Kapasitas pembudidaya meningkat serta kelembagaan Pokdakan lebih kuat
Jangka Menengah (3–5 Tahun)	Nilai tambah produk meningkat, terbentuk rantai nilai perikanan, dan kesempatan kerja bertambah	Pendapatan pembudidaya meningkat serta tumbuh usaha pengolahan hasil perikanan
Jangka Panjang (5–10 Tahun)	Terbentuk sentra perikanan budidaya yang berdaya saing dan menjadi penggerak ekonomi daerah	Kesejahteraan masyarakat meningkat serta pembangunan wilayah menjadi lebih merata

Sumber: Diolah Penulis (2026).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memberikan dampak yang bertahap. Pada tahap awal, fokus diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kapasitas pembudidaya. Selanjutnya, pada jangka menengah mulai terbentuk rantai nilai sektor perikanan yang memberikan nilai tambah dan membuka peluang usaha baru.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kebijakan, Pengembangan Sentra Perikanan Budidaya Berbasis Potensi Wilayah merupakan alternatif kebijakan yang paling tepat untuk diterapkan karena mampu menjawab akar permasalahan secara komprehensif. Pendekatan ini mengintegrasikan seluruh komponen pembangunan sektor perikanan dalam satu sistem yang saling mendukung sehingga dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah, efisiensi usaha, serta daya saing produk perikanan daerah.

Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, koordinasi lintas perangkat daerah, keterlibatan aktif kelompok pembudidaya, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan regulasi dan pembiayaan yang memadai. Kolaborasi tersebut menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan.

Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.



- Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh. (2026). *Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh Tahun 2025–2029*. Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Food and Agriculture Organization. (2024). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2024: Blue Transformation in Action*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cd0683en>
- Garlock, T. M., Gephart, J. A., Asche, F., Anderson, J. L., Bjørndal, T., Kumar, G., Lorenzen, K., Ropicki, A. J., Smith, M. D., Tveterås, R., & Vannuccini, S. (2024). *Environmental, economic, and social sustainability in aquaculture: The aquaculture performance indicators*. *Nature Communications*, 15, Article 49556. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-49556-8>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Job Creation and Local Economic Development 2023: Bridging the Great Green Divide*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Place-Based Policies for the Future*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e5ff6716-en>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154*.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan*. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020*.
- Troell, M., Costa-Pierce, B. A., Stead, S. M., Cottrell, R. S., Brugere, C., Farmery, A. K., Little, D. C., Strand, Å., Pullin, R. S. V., Soto, D., Beveridge, M. C. M., Salie, K., Dresdner, J., Moraes-Valenti, P., Blanchard, J. L., James, P., Yossa, R., Allison, E. H., Devaney, C., & Barg, U. (2023). *Perspectives on aquaculture's contribution to the Sustainable Development Goals for improved human and planetary health*. *Journal of the World Aquaculture Society*, 54(2), 251–342.
- Xu, C., Su, G., Brosse, S., Zhao, K., Zhang, M., Zhao, J., Chen, Y., & Lek, S. (2024). *Social benefits and environmental performance of aquaculture need to improve worldwide*. *Communications Earth & Environment*, 5, Article 698. <https://doi.org/10.1038/s43247-024-01790-0>